

Pedagogi publik Kristiani: Model integrasi teologi publik, nilai Pancasila, dan multikulturalisme dalam pendidikan Kristen di Indonesia

Reni Triposa¹ , Yonatan Alex Arifianto² 

^{1,2}Sekolah Tinggi Teologi Sangkakala, Salatiga, Indonesia

Correspondence:

renitripasa@sttsangkakala.ac.id

DOI:

<https://doi.org/10.30995/kur.v10i3.1199>

Article History

Submitted: Aug. 26, 2024

Reviewed: Oct. 30, 2024

Accepted: Dec. 29, 2024

Keywords:

Christian education;
multiculturalism;
Pancasila;
public theology;
religious moderation;
moderasi beragama;
multikulturalisme;
pendidikan Kristen;
teologi publik

Copyright: ©2024, Authors.

License:



Abstract: Indonesia's religious and cultural plurality is increasingly strained by polarization, exclusivism, and intolerance that now reach into schools and universities. Christian education is widely expected to respond, yet existing studies mostly affirm its role in general terms without specifying how public theology, Pancasila, and multiculturalism are integrated pedagogically. This study asks how Christian education in Indonesia can translate public theology into a workable pedagogical framework. Using descriptive qualitative research with a literature-study approach, the article analyzes academic and documentary sources relevant to public theology, religious moderation, and Christian education. The study proposes Christian public pedagogy, a model resting on three principles: epistemic humility that resists claims of religious superiority, dialogical praxis that treats the classroom as shared civic space, and civic formation that binds faith to national responsibility. The model positions Christian teachers as agents of social transformation and offers a concrete alternative to purely doctrinal instruction in plural classrooms.

Abstrak: Kemajemukan agama dan budaya Indonesia kini tertekan oleh polarisasi, eksklusivisme, dan intoleransi yang telah merambah ruang sekolah dan perguruan tinggi. Pendidikan Kristen kerap diharapkan menjawab persoalan tersebut, namun kajian terdahulu umumnya menegaskan perannya secara umum tanpa merinci bagaimana teologi publik, Pancasila, dan multikulturalisme dipadukan secara pedagogis. Penelitian ini mempertanyakan bagaimana pendidikan Kristen di Indonesia dapat menerjemahkan teologi publik menjadi kerangka pedagogis yang dapat diimplementasikan. Melalui penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka, artikel ini menganalisis sumber-sumber akademik dan dokumenter yang dipilih berdasarkan relevansinya terhadap teologi publik, moderasi beragama, dan pendidikan Kristen. Kajian ini menawarkan pedagogi publik Kristiani, yaitu model yang bertumpu pada tiga prinsip: kerendahan hati epistemik yang menolak klaim superioritas agama, praksis dialogis yang memperlakukan ruang kelas sebagai ruang bersama, dan formasi kewargaan yang mengikat iman pada tanggung jawab kebangsaan. Model ini menempatkan guru Kristen sebagai agen transformasi sosial sekaligus menawarkan alternatif konkret bagi pengajaran yang semata-mata doktrinal.

Pendahuluan

Indonesia dikenal sebagai negara dengan keragaman agama, suku, budaya, dan bahasa yang sangat beragam. Keragaman itu menjadikannya masyarakat multikultural. Secara konseptual, multikulturalisme mencerminkan karakter suatu negara yang menjunjung kemajemukan serta keberagaman identitas sosial dan budaya, sehingga penghargaan terhadap pluralitas tumbuh dari prinsip keadilan dan pemerataan bagi seluruh warga negara.¹ Dengan demikian, pluralisme dan multikulturalisme membawa implikasi bahwa setiap individu merasa dihargai sekaligus bertanggung jawab untuk hidup bersama dalam komunitasnya.² Namun, dalam konteks sosial keagamaan Indonesia yang majemuk, persoalan keberagaman dan kohesi sosial kerap menjadi tantangan tersendiri. Masyarakat multikultural menyimpan kekuatan dari masing-masing kelompok, tetapi juga menyimpan benih perpecahan yang berasal dari benturan antarbudaya, suku, ras, dan sistem nilai yang berlaku, yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan disintegrasi bangsa.³ Kerukunan yang terkoyak akibat konflik bermuatan suku, agama, ras, dan antargolongan telah berulang kali mengancam kemajemukan bangsa. Konflik horizontal yang terjadi selama ini menimbulkan luka dan trauma bagi masyarakat luas.⁴ Realitas tersebut membutuhkan pendekatan yang arif dalam membangun harmoni sosial, terutama di tengah menguatnya polarisasi dan ekstremisme berbasis agama.

Moderasi beragama tidak dapat dilepaskan dari nilai dasar bangsa Indonesia yang telah dirumuskan dalam Pancasila. Moderasi beragama memiliki keterkaitan erat dengan nilai fundamental bangsa, seperti Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, yang menegaskan pentingnya persatuan dalam keberagaman serta sikap saling menghormati. Integrasi nilai-nilai tersebut menjadi kunci untuk menjaga keharmonisan sosial di tengah masyarakat yang multikultural. Konsep moderasi beragama mengedepankan prinsip keseimbangan, toleransi, dan keadilan, yang sangat relevan dalam menghadapi persoalan intoleransi dan gejala ekstremisme keagamaan di Indonesia. Moderasi beragama berfungsi sebagai jalan tengah dalam menghadapi perbedaan, baik terhadap kelompok ekstrem maupun kelompok fundamental.⁵ Perlu ditegaskan bahwa toleransi yang dimaksud bukanlah peleburan keyakinan, maupun pertukaran keyakinan antarkelompok agama. Toleransi di sini dipahami dalam pengertian interaksi sosial, sehingga terdapat batas bersama mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilanggar. Karena moderasi beragama baru mulai terwujud, masih diperlukan sosialisasi yang lebih luas serta implementasi yang nyata, baik dalam aspek pemahaman maupun dalam praktik kehidupan sehari-hari. Proses ini idealnya dimulai dari masing-masing komunitas umat beragama sebagai langkah konkret untuk membangun harmoni di tengah keberagaman.⁶

Persoalan ini menjadi lebih mendesak karena intoleransi tidak lagi berhenti di ruang sosial umum, melainkan telah masuk ke dalam lembaga pendidikan. Riset Setara Institute me-

¹ Muhammad Abdul Gofur, Muhamad Fahmi Ridho Auliya, dan Mukh Nursikin, "Konsep Dasar Pendidikan Multikultural," *Sinar Dunia: Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Ilmu Pendidikan* 1, no. 4 (2022): 143-149.

² Mohammad Fahrur Rozi, "Pluralisme dan Multikulturalisme dalam Membangun Masyarakat Madani: Kajian Paradigmatik," *Al-Ibrah* 2, no. 2 (2017): 104-127.

³ Sarmini dan Raden Roro Nanik Setyowati, *Pendidikan Multikultural untuk Membangun Jiwa Nasionalisme Generasi Muda* (Yogyakarta: K-Media, 2020), 78.

⁴ Paulus Purwoto, Reni Triposa, dan Yusak Sigit Prabowo, "Menanamkan Kerukunan di Tengah Masyarakat Multikultural melalui Pendidikan Kristiani," *KHARISMATA: Jurnal Teologi Pantekosta* 4, no. 1 (2021): 69-83.

⁵ Edy Sutrisno, "Aktualisasi Moderasi Beragama di Lembaga Pendidikan," *Jurnal Bimas Islam* 12, no. 2 (2019): 323-348.

⁶ Pribadyo Prakosa, "Moderasi Beragama: Praksis Kerukunan Antar Umat Beragama," *Jurnal Ilmiah Religiosity Entity Humanity (JIREH)* 4, no. 1 (2022): 45-55.

nunjukkan bahwa jumlah pelajar intoleran aktif di sekolah menengah atas dan sederajat di lima kota di Indonesia meningkat. Lebih dari 56 persen responden menyetujui penerapan syariat Islam, dan 83,3 persen menilai bahwa Pancasila bukan ideologi negara yang bersifat permanen sehingga dapat diganti.⁷ Temuan tersebut sejalan dengan sejumlah peristiwa konkret. Di salah satu sekolah menengah atas negeri di Jakarta, seorang siswa nonmuslim diduga dijegal langkahnya dalam pemilihan ketua organisasi siswa karena alasan keyakinan agamanya.⁸ Di Solo, sekelompok anak merusak belasan makam Kristen, dan kepolisian menyelidiki dugaan adanya doktrin intoleransi yang ditanamkan kepada anak-anak tersebut.⁹ Pada jenjang yang lebih tinggi, berbagai asesmen lembaga menunjukkan bahwa perguruan tinggi umum menjadi sasaran penyebaran paham intoleransi dan ekstremisme.¹⁰ Rangkaian temuan ini menunjukkan bahwa lembaga pendidikan, yang seharusnya menjadi ruang pembentukan karakter toleran dan inklusif, justru dapat menjadi lahan subur bagi berkembangnya paham eksklusif.

Kondisi tersebut mengindikasikan kegagalan sistemik dalam membumikan nilai moderasi beragama dan multikulturalisme di dunia pendidikan. Dalam konteks inilah pendekatan teologi publik menjadi relevan untuk dikedepankan. Teologi publik merupakan cabang teologi yang berupaya menghadirkan suara iman Kristen di ruang publik secara dialogis dan transformatif. Istilah teologi publik muncul pada tahun 1970-an dan memperoleh daya tarik melalui tokoh-tokoh seperti Martin Marty dan Robert Bellah.¹¹ Dalam perkembangannya, teologi publik dipahami sebagai keterlibatan teologis yang kritis dan reflektif terhadap isu-isu politik dan sosial di tengah masyarakat.¹² Teologi publik berupaya menjembatani doktrin teologis dengan persoalan sosial dan politik aktual yang dihadapi masyarakat. Dalam kerangka penelitian ini, teologi publik Kristen dituntut untuk merespons tantangan keberagaman dengan mengedepankan nilai keadilan sosial, penghargaan terhadap perbedaan, dan solidaritas lintas iman.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengaitkan pendidikan Kristen dengan moderasi beragama. Allo, Gusmino, dan Sumiaty menekankan bahwa pendidikan agama Kristen mendorong moderasi dengan menanamkan nilai-nilai Kristiani, mempromosikan penghormatan terhadap keragaman, serta mendorong tindakan kemanusiaan yang selaras dengan prinsip Pancasila.¹³ Doni menarasikan peran pendidikan Kristen dalam mempromosikan nilai-nilai keragaman, toleransi, dan perdamaian sebagai bentuk perlawanan terhadap radikal-

⁷ Fathiyah Wardah, "Setara Institute: Jumlah Pelajar yang Intoleran Aktif Meningkat, 83% Nilai Pancasila Bisa Diganti," *VOA Indonesia*, 2023, diakses 24 April 2024, <https://www.voaindonesia.com/a/setara-institute-jumlah-pelajar-yang-intoleran-aktif-meningkat-56-setuju-syariat-islam/7097499.html>.

⁸ M. Julnis Firmansyah, "Dugaan Intoleransi di SMAN 52 Jakarta, Siswa Nonmuslim Dijegal di Pemilihan Ketua OSIS," *Tempo.co*, 2022, <https://www.tempo.co/arsip/dugaan-intoleransi-di-sman-52-jakarta-siswa-nonmuslim-dijegal-di-pemilihan-ketua-osis-271955>.

⁹ Yudha Satriawan, "Anak-Anak Tersangka Pelaku Pengrusakan Makam Ditangkap," *VOA Indonesia*, 2021, <https://www.voaindonesia.com/a/anak-anak-tersangka-pelaku-pengrusakan-makam-ditangkap/5936963.html>.

¹⁰ Saiful Maarif, "Kemenhan: Nyata, Ancaman Intoleransi di Perguruan Tinggi Umum," Kementerian Agama Republik Indonesia, 2022, <https://kemenag.go.id/nasional/kemenhan-nyata-ancaman-intoleransi-di-perguruan-tinggi-umum-wpf4ng>.

¹¹ Sebastian Kim, "Public Theology in the History of Christianity," dalam *A Companion to Public Theology* (Leiden: Brill, 2017), 40-66.

¹² Eshak Estafanos, "Speak So I May See You: Doing Public Theology in an Arab-Muslim Context," *International Journal of Public Theology* 18, no. 2 (2024): 266-288.

¹³ Deni Yanto Birrang Allo, Mardika Gusmino, dan Sumiaty Sumiaty, "Peran Pendidikan Agama Kristen Membentuk Individu yang Moderat dalam Keberagaman," *Masokan Ilmu Sosial dan Pendidikan* 3, no. 2 (2023): 125-137.

isme.¹⁴ Nego dan Pasang membahas pentingnya moderasi beragama dalam teologi Kristen untuk merespons konflik politik berbasis agama.¹⁵ Yosia telah melakukan eksplorasi awal mengenai pertemuan teologi publik dengan pendidikan agama Kristen pada jenjang dasar dan menengah.¹⁶

Meskipun demikian, keempat kajian tersebut berhenti pada penegasan normatif bahwa pendidikan Kristen berperan penting dalam moderasi beragama. Yang belum tersedia adalah rumusan tentang bagaimana peran itu dioperasikan di ruang kelas, yakni prinsip apa yang memandu guru, bagaimana klaim kebenaran iman diartikulasikan tanpa berubah menjadi klaim superioritas, dan bagaimana nilai Pancasila berfungsi sebagai kriteria pedagogis, bukan sekadar sebagai rujukan ideologis yang disebut pada awal pembelajaran. Di sinilah celah riset artikel ini terletak. Penelitian ini tidak mengulang penegasan bahwa pendidikan Kristen penting bagi moderasi beragama, melainkan mengajukan satu model pedagogis yang disebut pedagogi publik Kristiani, yaitu kerangka yang menerjemahkan tiga sumber, yakni teologi publik, nilai Pancasila, dan prinsip multikulturalisme menjadi tiga prinsip kerja yang dapat diterapkan oleh guru. Dengan demikian, kontribusi artikel ini bersifat konstruktif, bukan semata-mata deskriptif, dan diarahkan untuk memperkaya diskursus akademik sekaligus memberikan pegangan praktis bagi pengajaran serta perumusan visi lembaga pendidikan Kristen di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka sebagai metode utama dalam pengumpulan dan analisis data. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan penelaahan mendalam terhadap konsep teologis, filosofis, dan pedagogis yang berkaitan dengan pendidikan Kristen, moderasi beragama, Pancasila, dan multikulturalisme, yang bersifat konseptual dan tidak dapat diukur secara kuantitatif.

Penelusuran sumber dilakukan pada pangkalan data jurnal daring, dengan kata kunci teologi publik, *public theology*, moderasi beragama, pendidikan Kristen, Pancasila, dan multikulturalisme, baik secara tunggal maupun dalam kombinasi. Rentang terbitan dibatasi pada tahun 2015 sampai 2024 agar kajian ini merefleksikan diskursus mutakhir, kecuali sumber klasik yang berfungsi sebagai rujukan teoretis mengenai teologi kontekstual dan sejarah teologi publik. Kriteria inklusi yang diterapkan meliputi tiga hal, yaitu sumber berupa artikel jurnal ilmiah, buku akademik, atau dokumen lembaga resmi; sumber membahas secara eksplisit sekurang-kurangnya satu dari tiga tema inti penelitian; dan sumber memiliki kejelasan data bibliografis yang dapat diverifikasi. Kriteria eksklusi mencakup tulisan opini tanpa dasar akademik serta sumber dengan identitas penerbit yang tidak dapat ditelusuri. Dari penelusuran tersebut diperoleh tiga puluh empat sumber yang dianalisis, terdiri atas dua puluh sembilan artikel jurnal dan buku akademik serta lima sumber dokumenter berupa laporan lembaga dan pemberitaan media yang digunakan khusus untuk memotret kasus intoleransi di lembaga pendidikan.

Analisis data dilakukan melalui empat langkah. Pertama, mendeskripsikan hakikat teologi publik sebagai kerangka epistemologis pendidikan Kristen. Kedua, menarasikan kedudukan nilai-nilai Pancasila sebagai pilar teologi kontekstual dalam pendidikan Kristen. Ketiga, memetakan tantangan multikulturalisme yang dihadapi pendidikan Kristen. Keempat,

¹⁴ A. Doni, "Analisis Pendidikan Agama Kristen terhadap Paham Radikalisme dalam Konteks Indonesia," *Tri Tunggal: Jurnal Pendidikan Kristen dan Katolik* 1, no. 4 (2023): 63–81.

¹⁵ Obet Nego dan Agustina Pasang, "Moderasi Beragama dalam Bingkai Teologis: Respon terhadap Konflik Politik Berbasis Agama di Indonesia," *HUPERETES: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen* 5, no. 1 (2023): 30–43.

¹⁶ Adrianus Yosia, "Teologi Publik dan Pendidikan Agama Kristen K-12 di Indonesia: Suatu Eksplorasi Awal," *EDULEAD: Journal of Christian Education and Leadership* 4, no. 1 (2023): 98–110.

menyintesisakan ketiga bahasan tersebut menjadi model pedagogi publik Kristiani. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, yakni dengan membandingkan temuan dari sumber berbahasa Indonesia dan berbahasa Inggris, serta dari konteks Indonesia dan konteks lain seperti Ghana dan dunia Arab, sehingga rumusan yang dihasilkan tidak bertumpu pada satu perspektif tunggal.

Hakikat Teologi Publik sebagai Kerangka Epistemologis Pendidikan Kristen

Dalam dinamika kehidupan modern yang sarat tantangan sosial, politik, dan budaya, muncul kebutuhan akan pendekatan teologis yang tidak hanya bersifat personal, tetapi juga relevan bagi kehidupan publik. Teologi publik tidak berhenti pada relasi antara manusia dan Tuhan secara pribadi, melainkan juga membahas bagaimana iman Kristen diekspresikan dan dihidupi dalam kehidupan bermasyarakat. Teologi publik mencakup keterlibatan aktif dalam isu politik dan sosial dengan mendasarkan pendekatannya pada prinsip teologis Kristen. Tujuan utamanya adalah memberikan kontribusi dalam wacana publik dan proses perumusan kebijakan, dengan mengintegrasikan nilai moral dan etika Kristen ke dalam diskusi mengenai berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat.¹⁷

Secara mendasar, teologi publik lahir dari kesadaran bahwa iman Kristen tidak dapat dipisahkan dari realitas sosial, dan karenanya harus mampu memberikan kontribusi etis, moral, serta spiritual bagi kehidupan bersama. Dalam konteks ini, teologi publik berfungsi sebagai jembatan antara keyakinan iman dan tanggung jawab sosial warga gereja dalam membangun dunia yang lebih adil, damai, dan manusiawi. Sejarah perkembangannya menunjukkan bahwa teologi publik selalu tumbuh dari interaksi gereja dengan institusi politik dan sosial di sekitarnya, sehingga bentuknya tidak pernah seragam melainkan selalu terikat pada konteks tempat ia dikerjakan.¹⁸ Teologi publik, karena itu, menegaskan identitas gereja sebagai kehadiran yang setia, sekaligus profetis dan bersahabat bagi sesama manusia. Gereja perlu memperkuat dirinya sebagai komunitas iman yang bersedia mengambil risiko demi mereka yang terancam.¹⁹ Dengan latar itu, teologi publik dapat berfungsi sebagai kerangka epistemologis yang memberi landasan pengetahuan dan cara pandang khas dalam pengembangan pendidikan Kristen.

Epistemologi dalam pengertian ini tidak hanya menyangkut bagaimana pengetahuan diperoleh dan dikembangkan, tetapi juga nilai dasar yang mendasari serta menuntun proses pendidikan. Teologi publik dan pendidikan Kristen bertemu pada tujuan bersama, yaitu mempromosikan kebaikan bersama dan menangani isu publik dari perspektif Kristen. Sekolah dan gereja berfungsi sebagai wahana penyebaran pengetahuan sekaligus menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial di kalangan peserta didik.²⁰ Penerapan teologi publik dapat memperkaya pendidikan Kristen dengan mendorong peserta didik terlibat dalam tantangan sosial dan mengembangkan kompas moral yang kuat.²¹ Aktualisasi pendidikan Kristen yang berbasis teologi publik, dengan demikian, tidak berfokus semata pada transmisi doktrin atau ajaran moral, melainkan mengajak peserta didik menjadi subjek aktif sebagai pelopor keru-

¹⁷ Vincent J. Miller, "Public Theology: An Ever-Changing Task," *Horizons* 43, no. 2 (2016): 361-367.

¹⁸ Kim, "Public Theology in the History of Christianity."

¹⁹ Benediktus Denar dan Jean Loustar Jewadut, "Respons Gereja terhadap Persoalan Feminisasi Migrasi dalam Perspektif Teologi Publik," *Jurnal Alternatif: Wacana Ilmiah Interkultural* 12, no. 1 (2023): 1-18.

²⁰ Yosia, "Teologi Publik dan Pendidikan Agama Kristen K-12 di Indonesia."

²¹ Kwabena Opuni-Frimpong, "Public Theology, the Church and Youth Development in Ghana," *E-Journal of Humanities, Arts and Social Sciences* (2023): 1209-1218.

kunan dalam mengamalkan Pancasila dan nilai-nilai multikultural demi terciptanya masyarakat yang adil dan beradab.

Kehadiran teologi publik dalam pendidikan Kristen, karena itu, menjadi sangat relevan. Pendidikan Kristen tidak boleh berjalan dalam ruang hampa sosial atau terisolasi dari realitas bangsa. Sebaliknya, ia harus hadir sebagai kekuatan transformatif yang menanamkan nilai-nilai Alkitabiah yang menghargai perbedaan serta semangat kebersamaan. Teologi publik mendorong peserta didik untuk memahami bahwa iman Kristen bukan hanya urusan pribadi dengan Tuhan, tetapi juga mengandung panggilan untuk peduli dan terlibat dalam kehidupan bersama. Panggilan ini berakar dalam kesaksian Alkitab sendiri. Seruan Nabi Yeremia agar umat mengusahakan kesejahteraan kota tempat mereka dibuang dan berdoa bagi kota itu, karena kesejahteraan kota adalah kesejahteraan mereka juga (Yer. 29:7), merupakan rumusan paling ringkas mengenai tanggung jawab publik umat yang hidup sebagai minoritas di tengah masyarakat yang berbeda keyakinan.

Pendidikan Kristen yang berlandaskan teologi publik tidak hanya berfokus pada aspek kognitif dan doktrinal, melainkan juga menekankan pembentukan karakter serta kepekaan sosial peserta didik. Peserta didik diajak untuk tidak sekadar menghafal ajaran, melainkan memahami dan menghidupkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mereka dilatih untuk membaca keadaan masyarakat, memahami realitas ketidakadilan, diskriminasi, dan intoleransi, serta didorong untuk menjadi agen perdamaian dan keadilan. Pengalaman teologi publik dalam konteks lain memperkuat arah ini. Di dunia Arab yang mayoritas Muslim, praktik teologi publik justru menuntut kemampuan mendengarkan sebelum berbicara, sehingga kehadiran publik gereja tidak dibaca sebagai upaya dominasi.²² Pelajaran itu penting bagi Indonesia, karena pendidikan Kristen di negeri ini juga bekerja dalam posisi minoritas, dan karena itu memerlukan tata cara berbicara yang menjaga kepercayaan publik. Dengan demikian, hakikat teologi publik sebagai kerangka epistemologis dalam pendidikan Kristen terletak pada kemampuannya mengintegrasikan iman dan tanggung jawab sosial, serta mengarahkan pendidikan untuk membentuk manusia yang beriman, berpikir kritis, dan berkontribusi aktif dalam membangun masyarakat yang berkeadaban.

Nilai Pancasila sebagai Pilar Teologi Kontekstual dalam Pendidikan Kristen

Dalam konteks masyarakat Indonesia yang multikultural dan religius, diperlukan pendekatan teologis yang mampu menjembatani iman Kristen dan realitas kebangsaan. Pancasila sebagai dasar negara bukan hanya fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi juga dapat berfungsi sebagai pilar penting dalam membangun teologi kontekstual, khususnya dalam pendidikan Kristen. Pancasila bertindak sebagai keharusan moral yang mengikat individu dari berbagai latar belakang agama dan mempromosikan kehidupan sosial yang harmonis.²³ Prinsip Pancasila tidak bertentangan dengan ajaran Kristen, sehingga memungkinkan penghayatan iman Kristen yang inklusif dalam masyarakat pluralistik.²⁴ Dalam konteks Indonesia yang majemuk, nilai-nilai Pancasila memberikan kerangka etis dan filosofis yang memungkinkan ajaran Kristen dihidupi secara relevan, menyeluruh, dan berkontribusi terhadap realitas sosial.

²² Estafanos, "Speak So I May See You."

²³ Carolus Borromeus Mulyatno, "Pancasila as a Philosophical Basis of Religious Education in the Context of Indonesian Religious Diversity," *WISDOM* 4, no. 3 (2022): 101-111.

²⁴ Sri Ayu Dyah Utami dkk., "The Church in the Midst of Religious Pluralism: Christianity with the Ideology of Pancasila," *Conference Series* 4, no. 2 (2023): 34-43.

Untuk menjawab tantangan zaman, pemahaman teologi perlu disesuaikan dengan konteks kehidupan nyata umat. Teologi kontekstual merupakan pendekatan yang berakar pada pengalaman dan realitas konkret masyarakat, termasuk dinamika budaya, sejarah, serta kondisi sosial dan politik suatu bangsa. Pendekatan ini menegaskan bahwa teologi selalu dikerjakan dari suatu tempat dan bagi suatu komunitas tertentu, sehingga tidak ada teologi yang benar-benar netral terhadap konteksnya.²⁵ Penerapan teologi kontekstual memastikan bahwa ajaran Kristen relevan dengan konteks budaya dan sosial peserta didik, sehingga pengajaran menjadi lebih bermakna. Di era digital, teologi kontekstual membantu mengatasi masalah kontemporer seperti intoleransi dan radikalisme dengan mempromosikan moderasi beragama serta transformasi spiritual.²⁶ Pendekatan kontekstual juga memungkinkan pengajar menghubungkan ajaran alkitabiah dengan pengalaman kehidupan nyata, sehingga menunjang perkembangan kognitif sekaligus spiritual peserta didik.²⁷

Perlu ditegaskan bahwa menempatkan Pancasila sebagai pilar teologi kontekstual tidak berarti menyamakan Pancasila dengan wahyu, dan tidak pula menjadikannya sumber normatif yang sederajat dengan Alkitab. Yang dimaksud adalah bahwa Pancasila berfungsi sebagai kerangka etis bersama, yakni bahasa moral publik yang memungkinkan umat Kristen mengartikulasikan keyakinannya dalam ruang yang dihuni bersama penganut agama lain. Dalam kerangka ini, Pancasila berperan sebagai dasar filosofis pendidikan agama yang menumbuhkan keharmonisan di antara beragam latar belakang keagamaan serta mendorong solidaritas dan belas kasihan.²⁸ Pembacaan semacam ini menjaga pendidikan Kristen dari dua bahaya sekaligus, yaitu eksklusivisme yang menutup diri dari tanggung jawab kebangsaan dan sinker^tisme yang mengaburkan identitas iman.

Integrasi nilai Pancasila ke dalam pendidikan Kristen merupakan langkah strategis dalam menjawab tantangan konteks Indonesia yang pluralistik. Pendidikan Pancasila yang diintegrasikan ke dalam kurikulum sekolah untuk menanamkan nilai toleransi dan kesadaran sosial sejak dini terbukti berperan dalam mencegah berkembangnya radikalisme.²⁹ Pada saat yang sama, pendidikan Kristen memainkan peran penting dalam menanamkan toleransi dengan mengajarkan peserta didik untuk hidup harmonis dengan sesama, terlepas dari perbedaan yang ada. Pendidikan Kristen menekankan pengembangan karakter dan pemahaman tentang Tuhan, yang keduanya penting bagi terbentuknya sikap toleran.³⁰ Nilai yang terkandung dalam kelima sila Pancasila memiliki keterkaitan erat dengan nilai utama ajaran Kristen. Sila pertama bertemu dengan pengakuan akan Allah sebagai sumber kehidupan, sila kedua bertemu dengan pengakuan bahwa setiap manusia diciptakan menurut gambar Allah, sila ketiga bertemu dengan panggilan hidup dalam kesatuan tubuh Kristus, sila keempat ber-

²⁵ Angie Pears, *Doing Contextual Theology* (London: Routledge, 2009), 18-19.

²⁶ Agus Marulitua Marpaung dan Byung June Hwang, "Theology of Christian Education on Leading toward Spiritual Transformation in the Frame of Religious Moderation in Digital Society Context," *KURIOS* 9, no. 2 (2023): 432-440.

²⁷ Yafarman Zai dan Setiawan Larosa, "Contextual Teaching Learning pada Pembelajaran Pendidikan Agama Kristen sebagai Strategi Mencapai Pengalaman Spiritual," *MANTHANO: Jurnal Pendidikan Kristen* 3, no. 1 (2024): 25-36.

²⁸ Mulyatno, "Pancasila as a Philosophical Basis of Religious Education."

²⁹ Cahaya Auzi, Daulat Saragi, dan Yakobus Ndona, "Peran Pendidikan Pancasila dalam Mencegah Radikalisme pada Kalangan Siswa Sekolah Dasar," *Edu Cendikia: Jurnal Ilmiah Kependidikan* 4, no. 2 (2024): 721-729.

³⁰ Elsjani A. Langi, Yonatan Alex Arifianto, dan Saturnina Elisa, "Peran Pendidikan Agama Kristen terhadap Nilai Toleransi," *REAL DIDACHE: Journal of Christian Education* 3, no. 1 (2023): 63-73.

temu dengan praktik permusyawaratan jemaat, dan sila kelima bertemu dengan tuntutan nabi agar umat berlaku adil dan mencintai kesetiaan (Mik. 6:8).

Dalam praktiknya, pendidikan Kristen yang berpijak pada nilai Pancasila akan membentuk peserta didik menjadi pribadi yang tidak hanya cakap secara spiritual dan akademik, tetapi juga memiliki kepedulian sosial, menghargai perbedaan, serta berkomitmen menghormati sesama. Pendidikan Pancasila merupakan bagian integral dalam pembentukan karakter, dengan fokus pada nilai moral dan etika yang mendorong toleransi serta kesadaran sosial.³¹ Oleh karena itu, Pancasila sebagai pilar teologi kontekstual berperan penting dalam memperkuat relevansi pendidikan Kristen di Indonesia. Pancasila menjembatani iman dan kebangsaan, serta menuntun peserta didik menjadi warga negara yang taat sekaligus murid Kristus yang setia dan bertanggung jawab dalam kehidupan sosial.

Pendidikan Kristen dan Tantangan Multikulturalisme

Dalam era globalisasi yang ditandai oleh keberagaman budaya, suku, agama, dan pandangan hidup, pendidikan Kristen menghadapi tantangan besar dalam merespons realitas multikulturalisme. Pendidik Kristen didorong untuk mengadopsi pendekatan pendidikan kontekstual yang menghormati dan menghargai perbedaan budaya serta mempromosikan inklusivitas dan toleransi demi terbangunnya masyarakat yang damai.³² Pendekatan semacam ini diperlukan untuk menciptakan masyarakat yang menerima latar belakang sosial budaya yang beragam serta menumbuhkan sikap saling menghormati.³³ Multikulturalisme bukan hanya soal keberagaman yang harus diterima, tetapi juga tentang bagaimana mengembangkan sikap inklusif, toleransi, dan penghargaan terhadap perbedaan sebagai nilai yang selaras dengan ajaran Kristiani. Karena itu, pendidikan Kristen bertanggung jawab tidak hanya menyampaikan pengetahuan teologis, tetapi juga membentuk karakter peserta didik yang mampu hidup dalam masyarakat pluralistik secara harmonis dan penuh kasih. Di era globalisasi, pendidikan Kristen dituntut untuk beradaptasi dengan mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan ke dalam pengembangan karakter dan kepedulian sosial dalam konteks multikultural.³⁴

Meskipun demikian, tantangan multikulturalisme bagi pendidikan Kristen tidak dapat direduksi menjadi seruan umum untuk bersikap terbuka. Sekurang-kurangnya terdapat tiga tantangan internal. Pertama, eksklusivisme doktrinal, yaitu kecenderungan menempatkan kebenaran iman sendiri sebagai satu-satunya kebenaran yang sah di seluruh ranah kehidupan, termasuk ranah sosial yang seharusnya dinegosiasikan bersama. Kedua, sektarianisme internal, yaitu perpecahan di antara denominasi Kristen sendiri, yang membuat seruan kerukunan lintas agama kehilangan kredibilitas ketika kerukunan di dalam rumah sendiri belum terwujud. Ketiga, pemahaman doktrinal yang sempit, yaitu pengajaran yang memisahkan iman dari tanggung jawab sosial, sehingga peserta didik tumbuh dengan keyakinan bahwa kesalehan pribadi sudah memadai. Ketiga tantangan tersebut menjelaskan mengapa penambahan materi tentang toleransi ke dalam kurikulum sering kali tidak mengubah sikap peserta didik, se-

³¹ Ari Metalin Ika Puspita dkk., "Optimalisasi Peran Pendidikan Pancasila dalam Menumbuhkan Sikap Toleransi dan Kepedulian Sosial di Kalangan Mahasiswa," *Garuda: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Filsafat* 2, no. 2 (2024): 146-155.

³² Ayu Kartini and Dinie Anggraeni Dewi, "Implementasi Pendidikan Pancasila dalam Menumbuhkan Rasa Nasionalisme Generasi Muda di Era Digital," *Jurnal Pendidikan dan Kewirausahaan* 9, no. 2 (2021): 405-418.

³³ I Made Suardana, I Putu Ayub Darmawan, dan Regita Oktavina Runtukahu, "Multicultural Christian Education in an Indonesian Church Context," *Pharos Journal of Theology* 104, no. 2 (2023): 1-12.

³⁴ Jefrit Johannis Messakh dan Jacob Messakh, "Peran Pendidikan Agama Kristen dalam Membangun Karakter Misi dalam Konteks Globalisasi," *REAL DIDACHE: Journal of Christian Education* 3, no. 2 (2023): 74-89.

bab persoalannya terletak pada kerangka teologis yang mendasari pengajaran, bukan pada jumlah materi.

Tantangan multikulturalisme juga menuntut pendekatan pedagogis yang dialogis dan reflektif. Pendidik Kristen perlu menciptakan ruang belajar yang aman dan terbuka, tempat setiap peserta didik merasa dihargai atas identitasnya. Pendidikan multikultural yang kritis menghormati hak peserta didik atas kebebasan berekspresi dan berserikat, sekaligus menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman.³⁵ Ruang kelas yang dialogis mensyaratkan bahwa perbedaan pendapat tidak segera dinilai sebagai penyimpangan, melainkan diperlakukan sebagai bahan percakapan yang dapat diuji bersama. Dengan pendekatan demikian, pendidikan Kristen dapat menjadi sarana transformasi sosial yang membangun jembatan di antara perbedaan, bukan tembok pemisah, serta memperkuat misi gereja dalam mempromosikan perdamaian, keadilan, dan solidaritas di tengah masyarakat yang majemuk.

Perlu dicatat pula bahwa tantangan multikulturalisme di Indonesia memiliki dimensi kewilayahan yang tidak seragam. Pendidikan Kristen di wilayah dengan komunitas Kristen sebagai kelompok mayoritas menghadapi persoalan yang berbeda dari pendidikan Kristen di wilayah tempat komunitas Kristen berada dalam posisi minoritas. Pada situasi pertama, godaan utamanya adalah kemapanan yang membuat kepekaan terhadap kelompok lain menumpul. Pada situasi kedua, godaan utamanya adalah sikap defensif yang menutup diri demi menjaga kelangsungan identitas. Keduanya sama-sama menghambat terbentuknya sikap moderat, meskipun melalui jalan yang berlawanan. Karena itu, setiap penerapan model pendidikan yang inklusif perlu dibaca ulang sesuai dengan posisi sosial komunitas Kristen di wilayah masing-masing dan tidak dapat diseragamkan melalui satu kurikulum nasional tanpa penyesuaian.

Pedagogi Publik Kristiani: Model Sinergi Iman, Moderasi, dan Kebangsaan

Pembahasan pada tiga bagian sebelumnya menghasilkan tiga temuan yang saling melengkapi. Teologi publik menyediakan kerangka epistemologis yang menautkan iman dengan tanggung jawab sosial. Pancasila menyediakan bahasa moral publik yang memungkinkan iman diartikulasikan dalam ruang bersama. Multikulturalisme menyediakan diagnosis atas hambatan internal yang menghalangi pendidikan Kristen dalam menjalankan peran tersebut. Bagian ini menyintesis ketiganya menjadi satu model yang disebut pedagogi publik Kristiani, yang bertumpu pada tiga prinsip kerja.

Prinsip pertama adalah kerendahan hati epistemik. Prinsip ini menegaskan bahwa keyakinan akan kebenaran Injil tidak identik dengan klaim bahwa pemahaman seseorang atas Injil sudah sempurna dan final. Dalam praktik pengajaran, prinsip ini berarti guru mengajarkan doktrin dengan keyakinan penuh, namun sekaligus membedakan antara isi iman dan tafsir manusiawi atas iman tersebut. Perbedaan ini penting karena akar intoleransi yang dipetakan pada bagian pendahuluan adalah pemahaman sempit yang menganggap agamanya lebih unggul. Kerendahan hati epistemik menjawab akar tersebut secara langsung, bukan dengan melemahkan keyakinan, melainkan dengan menempatkan keyakinan itu dalam kesadaran bahwa pengetahuan manusia tentang Allah selalu bersifat parsial. Prinsip ini sejalan dengan kesaksian teologi publik dalam konteks minoritas, yang menuntut kesediaan mendengarkan sebelum menyatakan pendirian.³⁶

³⁵ Nermine Abd Elkader, "Dialogic Multicultural Education Theory and Praxis: Dialogue and the Problems of Multicultural Education in a Pluralistic Society," *Dialogic Pedagogy: An International Online Journal* 3 (2015): 1-19.

³⁶ Estafanos, "Speak So I May See You."

Prinsip kedua adalah praksis dialogis. Prinsip ini memperlakukan ruang kelas sebagai ruang bersama, bukan ruang tertutup yang steril dari perbedaan. Secara operasional, praksis dialogis berarti guru merancang pembelajaran yang memberi tempat bagi pertanyaan yang belum terjawab, mendorong peserta didik mengartikulasikan alasan di balik keyakinannya, dan melatih mereka menanggapi pandangan yang berbeda dengan argumen, bukan dengan pengucilan. Pendidikan yang menekankan inklusivitas dan dialog antaragama penting untuk menumbuhkan rasa saling menghormati di antara komunitas agama dan budaya yang berbeda.³⁷ Praksis dialogis juga menuntut bahwa dialog tidak berhenti pada percakapan di kelas, melainkan berlanjut menjadi perjumpaan nyata, misalnya melalui kegiatan pelayanan sosial bersama yang melibatkan peserta didik dari latar belakang keyakinan yang berbeda. Perjumpaan semacam itu membuat kategori tentang orang lain terbentuk dari pengalaman, bukan dari prasangka yang diwariskan.

Prinsip ketiga adalah formasi kewargaan. Prinsip ini mengikat iman pada tanggung jawab kebangsaan, sehingga peserta didik memahami bahwa menjadi murid Kristus dan menjadi warga negara yang bertanggung jawab bukanlah dua panggilan yang saling bersaing. Pendidikan Kristen memengaruhi perkembangan rohani dan karakter serta membawa dampak positif sebagai garam dan terang bagi lingkungan sekitarnya.³⁸ Metafora garam dan terang dalam Matius 5:13-16 justru mengandaikan kehadiran di tengah, bukan pemisahan diri, sehingga formasi kewargaan bukan penambahan asing terhadap iman melainkan konsekuensi langsung darinya. Gereja dan pendidik Kristen dapat membimbing orang percaya untuk menanggapi panggilan Tuhan dan menjadi anggota masyarakat yang aktif dalam membangun kedamaian.³⁹ Secara konkret, formasi kewargaan berarti peserta didik dilatih membaca persoalan publik di sekitarnya, seperti ketimpangan ekonomi, kerusakan lingkungan, atau diskriminasi terhadap kelompok minoritas, lalu merumuskan respons yang berakar pada imannya sekaligus dapat dipertanggungjawabkan di ruang publik.

Ketiga prinsip tersebut tidak dapat dipisahkan. Kerendahan hati epistemik tanpa formasi kewargaan menghasilkan sikap toleran yang pasif. Praksis dialogis tanpa kerendahan hati epistemik menghasilkan dialog yang semu, karena salah satu pihak sejak awal sudah memastikannya. Formasi kewargaan tanpa praksis dialogis menghasilkan aktivisme yang tidak terhubung dengan komunitas lain. Sinergi ketiganya menempatkan iman, moderasi, dan kebangsaan sebagai tiga aspek dari satu formasi yang utuh, bukan tiga muatan terpisah yang dijabarkan dalam satu kurikulum.

Dalam model ini, guru Kristen menempati posisi kunci sebagai agen transformasi sosial. Peran tersebut menuntut kompetensi yang melampaui penguasaan materi, yaitu kemampuan memfasilitasi percakapan yang sulit, kepekaan dalam membaca dinamika relasi di kelas, serta keteladanan dalam memperlakukan perbedaan. Pendidik Kristen perlu mengenali makna konteks sosial dan budaya dalam proses pendidikan, karena setiap peserta didik memiliki latar budaya yang berbeda-beda, yang membentuk cara pandang mereka terhadap kebenaran. Karena itu, penyiapan guru menjadi prasyarat penerapan model ini dan tidak cukup diselesaikan hanya melalui revisi dokumen kurikulum semata.

³⁷ Immanuel Lando Manalu dkk., "Model Pendidikan Agama Kristen dalam Mengembangkan Masyarakat Majemuk di Indonesia," *Indonesia Journal of Religious* 6, no. 1 (2023): 45-57.

³⁸ Bulanda Agata, Mariani Barus, dan Yonatan Alex Arifianto, "Pendidikan Kristiani Membangun Nilai Spiritualitas Remaja Kristen," *SIKIP: Jurnal Pendidikan Agama Kristen* 3, no. 2 (2022): 115-128.

³⁹ Delpi Novianti, "Hakikat Pendidikan Kristen dalam Gereja," *Jurnal Riset Rumpun Agama dan Filsafat* 3, no. 1 (2024): 108-119, <https://doi.org/10.55606/jurrafi.v3i1.2749>.

Gereja dan lembaga pendidikan Kristen perlu bekerja sama untuk mengaktualisasikan model ini. Gereja berfungsi sebagai basis spiritual yang membentuk imajinasi teologis jemaat, sedangkan lembaga pendidikan berfungsi sebagai ruang tempat imajinasi itu diuji dan dipraktikkan bersama pihak lain. Dalam konteks yang lebih majemuk, pendidikan Kristen tidak dapat lagi bersifat eksklusif dan terbatas pada ruang kelas atau gereja semata. Sebaliknya, ia harus menyatu dengan kehidupan masyarakat luas dan menjadi kekuatan transformatif yang mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang bertanggung jawab, mencintai perdamaian, serta mampu hidup berdampingan di tengah keberagaman.

Penerapan model ini pada tataran kurikulum dapat ditempuh melalui tiga jalur yang saling menopang. Pertama, jalur muatan, yaitu memasukkan bahasan mengenai kemajemukan Indonesia, sejarah konflik sosial, dan tanggung jawab publik umat ke dalam pokok bahasan pendidikan agama Kristen, sehingga tema tersebut tidak hanya muncul sebagai selingan. Kedua, jalur metode, yaitu mengubah cara pembelajaran dari ceramah searah menjadi diskusi terbimbing, pembelajaran berbasis masalah, dan penugasan yang menuntut peserta didik untuk berjumpa langsung dengan realitas sosial di sekitarnya. Ketiga, jalur penilaian, yaitu memperluas indikator keberhasilan belajar sehingga tidak berhenti pada penguasaan doktrin, melainkan mencakup kemampuan peserta didik untuk menjelaskan pandangan pihak lain secara adil sebelum menanggapinya. Jalur ketiga merupakan bagian yang paling sering terabaikan, padahal penilaian menentukan apa yang benar-benar dianggap penting oleh peserta didik.

Model ini juga memiliki batas yang perlu dinyatakan secara jujur. Pedagogi publik Kristiani mengandaikan tersedianya kebebasan akademik di lembaga pendidikan, sehingga penerapannya akan menghadapi hambatan nyata di lingkungan yang menekan percakapan terbuka tentang perbedaan. Model ini juga mengandaikan kesiapan guru untuk menghadapi ketidakpastian yang tidak selalu tersedia dan karenanya memerlukan pendampingan berkelanjutan.

Kesimpulan

Kehidupan bangsa Indonesia yang multikultural menuntut pendidikan Kristen untuk bertransformasi menjadi pendidikan yang inklusif, kontekstual, dan berorientasi pada pembentukan karakter serta tanggung jawab sosial. Teologi publik dan teologi kontekstual berfungsi sebagai fondasi epistemologis dalam membangun paradigma pendidikan Kristen yang tidak hanya berfokus pada aspek spiritual, tetapi juga pada aspek sosial dan kebangsaan. Dengan menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pilar etis, pendidikan Kristen dapat menyelaraskan ajaran iman dengan semangat kebangsaan serta mendorong lahirnya peserta didik yang toleran, cinta damai, dan peduli terhadap keadilan sosial.

Kontribusi utama kajian ini adalah rumusan model pedagogi publik Kristiani yang bertumpu pada tiga prinsip kerja, yaitu kerendahan hati epistemik yang menolak klaim superioritas agama, praksis dialogis yang memperlakukan ruang kelas sebagai ruang bersama, serta formasi kewargaan yang mengikat iman pada tanggung jawab kebangsaan. Ketiga prinsip tersebut menerjemahkan teologi publik, nilai Pancasila, dan prinsip multikulturalisme menjadi pegangan yang dapat dioperasikan oleh guru, sehingga peran pendidikan Kristen bagi moderasi beragama tidak berhenti pada penegasan normatif. Dalam model ini, gereja dan lembaga pendidikan Kristen bekerja secara berpasangan, dan guru Kristen menempati posisi kunci sebagai agen transformasi sosial.

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang perlu diakui. Kajian ini sepenuhnya bersandar pada studi pustaka, sehingga model yang ditawarkan bersifat konseptual dan belum diuji da-

lam praktik pembelajaran. Selain itu, kajian ini belum memasukkan suara peserta didik dan guru sebagai pelaku langsung dalam proses pendidikan. Karena itu, penelitian lanjutan disarankan untuk menempuh tiga arah. Pertama, penelitian lapangan berupa studi kasus di sekolah Kristen di wilayah dengan tingkat kemajemukan tinggi untuk menguji keterterapannya. Kedua, penelitian pengembangan menerjemahkan ketiga prinsip tersebut menjadi perangkat pembelajaran dan indikator penilaian yang dapat diukur. Ketiga, penelitian mengenai Kesiapan dan kebutuhan pelatihan guru pendidikan agama Kristen dalam memfasilitasi percakapan tentang perbedaan di ruang kelas. Melalui ketiga arah tersebut, gagasan pedagogi publik Kristiani dapat diuji, disempurnakan, dan pada akhirnya memberikan sumbangan nyata bagi upaya membangun masyarakat Indonesia yang adil, damai, dan beradab.

Referensi

- Agata, Bulanda, Mariani Barus, and Yonatan Alex Arifianto. "Pendidikan Kristiani Membangun Nilai Spiritualitas Remaja Kristen." *SIKIP: Jurnal Pendidikan Agama Kristen* 3, no. 2 (2022): 115–128.
- Allo, Deni Yanto Birrang, Mardika Gusmino, and Sumiaty Sumiaty. "Peran Pendidikan Agama Kristen Membentuk Individu yang Moderat dalam Keberagaman." *Masokan Ilmu Sosial dan Pendidikan* 3, no. 2 (2023): 125–137.
- Auzi, Cahaya, Daulat Saragi, and Yakobus Ndona. "Peran Pendidikan Pancasila dalam Mencegah Radikalisme pada Kalangan Siswa Sekolah Dasar." *Edu Cendikia: Jurnal Ilmiah Kependidikan* 4, no. 2 (2024): 721–729.
- Doni, A. "Analisis Pendidikan Agama Kristen terhadap Paham Radikalisme dalam Konteks Indonesia." *Tri Tunggal: Jurnal Pendidikan Kristen dan Katolik* 1, no. 4 (2023): 63–81.
- Elkader, Nermine Abd. "Dialogic Multicultural Education Theory and Praxis: Dialogue and the Problems of Multicultural Education in a Pluralistic Society." *Dialogic Pedagogy: An International Online Journal* 3 (2015): 1–19.
- Estafanos, Eshak. "Speak So I May See You: Doing Public Theology in an Arab-Muslim Context." *International Journal of Public Theology* 18, no. 2 (2024): 266–288.
- Firmansyah, M. Julnis. "Dugaan Intoleransi di SMAN 52 Jakarta, Siswa Nonmuslim Dijegal di Pemilihan Ketua OSIS." *Tempo.co*, 2022. Artikel Tempo.co
- Gofur, Muhammad Abdul, Muhamad Fahmi Ridho Auliya, and Mukh Nursikin. "Konsep Dasar Pendidikan Multikultural." *Sinar Dunia: Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Ilmu Pendidikan* 1, no. 4 (2022): 143–149.
- Kartini, Ayu, and Dinie Anggraeni Dewi. "Implementasi Pendidikan Pancasila dalam Menumbuhkan Rasa Nasionalisme Generasi Muda di Era Digital." *Jurnal Pendidikan dan Kewirausahaan* 9, no. 2 (2021): 405–418.
- Kim, Sebastian. "Public Theology in the History of Christianity." In *A Companion to Public Theology*, 40–66. Leiden: Brill, 2017.
- Langi, Elsiani A., Yonatan Alex Arifianto, and Saturnina Elisa. "Peran Pendidikan Agama Kristen terhadap Nilai Toleransi." *REAL DIDACHE: Journal of Christian Education* 3, no. 1 (2023): 63–73.
- Maarif, Saiful. "Kemenhan: Nyata, Ancaman Intoleransi di Perguruan Tinggi Umum." Kementerian Agama Republik Indonesia, 2022. Artikel Kementerian Agama Republik Indonesia
- Manalu, Immanuel Lando, et al. "Model Pendidikan Agama Kristen dalam Mengembangkan Masyarakat Majemuk di Indonesia." *Indonesia Journal of Religious* 6, no. 1 (2023): 45–57.
- Marpaung, Agus Marulitua, and Byung June Hwang. "Theology of Christian Education on Leading toward Spiritual Transformation in the Frame of Religious Moderation in Digital Society Context." *KURIOS* 9, no. 2 (2023): 432–440.

- Messakh, Jefrit Johanis, and Jacob Messakh. "Peran Pendidikan Agama Kristen dalam Membangun Karakter Misi dalam Konteks Globalisasi." *REAL DIDACHE: Journal of Christian Education* 3, no. 2 (2023): 74–89.
- Miller, Vincent J. "Public Theology: An Ever-Changing Task." *Horizons* 43, no. 2 (2016): 361–367.
- Mulyatno, Carolus Borromeus. "Pancasila as a Philosophical Basis of Religious Education in the Context of Indonesian Religious Diversity." *WISDOM* 4, no. 3 (2022): 101–111.
- Nego, Obet, and Agustina Pasang. "Moderasi Beragama dalam Bingkai Teologis: Respon terhadap Konflik Politik Berbasis Agama di Indonesia." *HUPERETES: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen* 5, no. 1 (2023): 30–43.
- Novianti, Delpi. "Hakikat Pendidikan Kristen dalam Gereja." *Jurnal Riset Rumpun Agama dan Filsafat* 3, no. 1 (2024): 108–119. DOI artikel Novianti
- Opuni-Frimpong, Kwabena. "Public Theology, the Church and Youth Development in Ghana." *E-Journal of Humanities, Arts and Social Sciences* (2023): 1209–1218.
- Pears, Angie. *Doing Contextual Theology*. London: Routledge, 2009.
- Prakosa, Pribadyo. "Moderasi Beragama: Praksis Kerukunan Antar Umat Beragama." *Jurnal Ilmiah Religiosity Entity Humanity (JIREH)* 4, no. 1 (2022): 45–55.
- Purwoto, Paulus, Reni Triposa, and Yusak Sigit Prabowo. "Menanamkan Kerukunan di Tengah Masyarakat Multikultural melalui Pendidikan Kristiani." *KHARISMATA: Jurnal Teologi Pantekosta* 4, no. 1 (2021): 69–83.
- Puspita, Ari Metalin Ika, et al. "Optimalisasi Peran Pendidikan Pancasila dalam Menumbuhkan Sikap Toleransi dan Kepedulian Sosial di Kalangan Mahasiswa." *Garuda: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Filsafat* 2, no. 2 (2024): 146–155.
- Rozi, Mohammad Fahrur. "Pluralisme dan Multikulturalisme dalam Membangun Masyarakat Madani: Kajian Paradigmatik." *Al-Ibrah* 2, no. 2 (2017): 104–127.
- Satriawan, Yudha. "Anak-Anak Tersangka Pelaku Pengrusakan Makam Ditangkap." *VOA Indonesia*, 2021. Artikel VOA Indonesia
- Sarmini, and Raden Roro Nanik Setyowati. *Pendidikan Multikultural untuk Membangun Jiwa Nasionalisme Generasi Muda*. Yogyakarta: K-Media, 2020.
- Suardana, I Made, I Putu Ayub Darmawan, and Regita Oktavina Runtukahu. "Multicultural Christian Education in an Indonesian Church Context." *Pharos Journal of Theology* 104, no. 2 (2023): 1–12.
- Sutrisno, Edy. "Aktualisasi Moderasi Beragama di Lembaga Pendidikan." *Jurnal Bimas Islam* 12, no. 2 (2019): 323–348.
- Triposa, Reni, and Dirk Roy Kolibu. "Reconceptualization of Education in Plural Society: Embracing Cultural Diversity in Christian Teaching in Indonesia." *Journal of Education and Learning Technology* 5, no. 7 (2024): 221–228.
- Utami, Sri Ayu Dyah, et al. "The Church in the Midst of Religious Pluralism: Christianity with the Ideology of Pancasila." *Conference Series* 4, no. 2 (2023): 34–43.
- Wardah, Fathiyah. "Setara Institute: Jumlah Pelajar yang Intoleran Aktif Meningkat, 83% Nilai Pancasila Bisa Diganti." *VOA Indonesia*, 2023. Diakses 24 April 2024. Artikel VOA Indonesia
- Yosia, Adrianus. "Teologi Publik dan Pendidikan Agama Kristen K-12 di Indonesia: Suatu Eksplorasi Awal." *EDULEAD: Journal of Christian Education and Leadership* 4, no. 1 (2023): 98–110.
- Zai, Yafarman, and Setiaman Larosa. "Contextual Teaching Learning pada Pembelajaran Pendidikan Agama Kristen sebagai Strategi Mencapai Pengalaman Spiritual." *MANTHANO: Jurnal Pendidikan Kristen* 3, no. 1 (2024): 25–36.